



GERAKAN PERLINDUNGAN ANAK DILUNCURKAN

Kasus Kekerasan Cenderung Meningkatkan

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta meluncurkan gerakan perlindungan anak di tiap kecamatan. Gerakan tersebut sebagai wujud komitmen aparat pemerintah yang ada di wilayah guna memperhatikan kebutuhan anak. Hal ini seiring tren kekerasan pada anak yang cenderung meningkat.

Dalam kurun waktu satu tahun pada 2013-2014, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebenarnya terjadi penurunan. Yakni dari 691 kasus menjadi 641 kasus. Namun kekerasan terhadap anak yang termasuk dalam KDRT tersebut justru naik dari 103 kasus menjadi 142 kasus. "Harapan kami, kalau KDRT itu turun maka kekerasan terhadap anak juga turun. Makanya perlu gerakan bersama semacam ini," ungkap Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta, Dra Lucy Irawati di sela peluncuran gerakan perlindungan anak di Balaikota, Rabu (26/8).

Peluncuran gerakan perlindungan anak tersebut sekaligus peringatan Hari Anak Nasional tingkat kota. Forum Anak yang terbentuk di tiap kecamatan pun turut dilibatkan. Masing-masing forum juga membacakan deklarasi agar seluruh kebutuhan tumbuh kembang anak tidak diacuhkan.

Lucy menambahkan, kekerasan yang menimpa anak sebenarnya tidak selalu dari sisi fisik, melainkan psikis. Bahkan kekerasan psikis cukup mendominasi seperti bentakan orangtua, menjerew maupun mencubit. Meski hal itu dinilai sepele oleh masyarakat awam, namun kelak bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. "Melalui kader anak, masyarakat akan terus diimbau supaya orangtua tidak lagi berbicara keras terhadap anak. Apalagi sampai bertindak kasar secara fisik," terangnya.

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengaku, ia sudah menerbitkan Perwal 34/2015 terkait rencana aksi daerah kaitannya dengan perwujudan kota layak anak. Menurutnya, lingkungan keluarga yang ramah anak yakni bisa memberikan perlindungan bagi anak. Perlindungan tersebut tidak sebatas fisik namun juga sosial. "Contoh sederhana saja dalam hal komunikasi, orangtua harus mengerti bagaimana berkomunikasi dalam bahasa anak," akunya.

Terkait kebutuhan anak dalam hal bersosialisasi, menurut Haryadi, sudah diakomodasi melalui pengadaan ruang terbuka hijau publik. Hingga saat ini sudah terdapat 35 ruang terbuka di tingkat kelurahan. Dalam satu tahun, minimal ada dua ruang terbuka yang difasilitasi pemerintah. Pada ruang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat bermain anak.

Begitu pula dengan keberadaan kampung ramah anak. Hingga 2016, ditargetkan kampung ramah anak mampu terbentuk berbasis RW. Meski demikian, ungkap Haryadi, perlindungan dari sisi regulasi akan terus ia perhatikan supaya tumbuh kembang anak mendapat perlindungan hukum. (Dhi)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005